BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar terdiri atas lautan, dengan total sekitar 607 pulau, dan hanya 52 pulau yang berpenghuni. Luas wilayah laut di provinsi ini mencapai sekitar 200.000 km², jauh lebih besar dibandingkan dengan daratannya yang hanya sekitar 47.349,9 km², sehingga laut memainkan peran dominan dalam struktur geografis NTT. Kondisi geografis tersebut secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat, karena laut tidak hanya menjadi sumber daya alam utama, tetapi juga berperan sebagai jalur transportasi dan koneksi antarwilayah. Keadaan ini membuka peluang bagi berkembangnya sektor perikanan dan pariwisata sebagai penopang ekonomi utama. Meski begitu, ketergantungan terhadap sumber daya laut juga menimbulkan persoalan, seperti ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi hasil perikanan serta kelestarian ekosistem laut. Sementara itu, wilayah daratan NTT memiliki bentuk geografis yang bervariasi, mulai dari dataran hingga daerah pegunungan, dan meskipun memiliki potensi untuk kegiatan pertanian dan permukiman, banyak daerah masih dihadapkan pada permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas. Hambatan tersebut kerap memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar ketimpangan antar wilayah. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa NTT masih tergolong sebagai

provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, yaitu sebesar 20,05% pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Walaupun terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menempatkan NTT sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga secara nasional. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten sangat terasa, terutama di wilayah seperti Kabupaten Manggarai Barat, Belu, Kota Kupang, Ende, dan Sikka yang masih mengalami kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia (Solikatun et al., 2014) . Permasalahan seperti terbatasnya akses pendidikan, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, serta infrastruktur yang belum memadai turut mendorong tingginya angka kemiskinan dan menyebabkan banyak penduduk terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diatasi.

Kemiskinan merupakan situasi sosial dan ekonomi di mana individu atau kelompok mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan secara keseluruhan. Menurut BPS (2012) dalam (Mahsunah, 2013) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran.

Dalam hal pengukuran, kemiskinan umumnya dikenali melalui pendekatan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh instansi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan tersebut menggambarkan batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok kehidupan. Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari sejauh mana penurunan angka kemiskinan terjadi di suatu negara. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga mencakup aspek sosial, kondisi lingkungan, keberdayaan masyarakat, serta tingkat partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Yacoub, 2012).

Kemiskinan menjadi salah satu indikator sosial dan ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di suatu wilayah (Priseptian & Primandhana, 2022)**.** Ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan pembangunan yang belum mencapai seluruh wilayah merupakan komponen utama penyebab kemiskinan. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di daerah terpencil yang sulit diakses, yang berarti mereka tidak memiliki akses yang memadai ke infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, kemiskinan diperparah oleh rendahnya jenjang pendidikan, keterampilan yang rendah, kesempatan kerja yang terbatas, dan kondisi geografis dan iklim yang tidak mendukung, seperti musim kemarau yang lama.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, menjadikannya salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Pesona laut yang eksotis dengan ribuan pulau, terumbu

karang yang masih alami, serta pantai berpasir putih yang menawan menawarkan pengalaman wisata bahari yang khas dan berhasil menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, keberadaan flora dan fauna endemik turut memperkuat citra NTT sebagai tujuan wisata alam yang unik dan berkelas dunia. Keanekaragaman hayati serta kekayaan budaya yang dimiliki menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pelaku pariwisata untuk terus mendorong pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya lokal agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Kedatangan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu wilayah atau negara (Marcella & Anas, 2023).

Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke lokasi lain dengan tujuan untuk berlibur, rekreasi, atau keperluan tertentu, seperti bisnis atau studi, dan biasanya tinggal di lokasi tersebut untuk jangka waktu yang relatif singkat. Pengertian ini mencakup berbagai jenis wisatawan, baik yang berasal dari dalam negeri (domestik) maupun dari luar negeri (mancanegara). Wisatawan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian suatu daerah melalui pengeluaran mereka untuk akomodasi, makanan, transportasi, dan aktivitas wisata lainnya. Selain itu, keberadaan wisatawan juga dapat mendorong pelestarian budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya sektor pariwisata. Dalam neraca nasional, pengeluaran wisatawan

tersebut dianggap sebagai *invisible export* bagi perekonomian negara destinasi. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata (Aliansyah & Hermawan, 2021).

Pengelolaan sektor pariwisata yang optimal dapat mendorong peningkatan infrastruktur dan layanan publik di suatu wilayah, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan. Investasi dalam infrastruktur ini tidak hanya menguntungkan wisatawan tetapi juga berdampak positif pada penduduk setempat dengan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pariwisata berfungsi tidak hanya sebagai sektor ekonomi tetapi juga sebagai alat strategis yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, dengan pengelolaan dikelola secara inklusif dan berkelanjutan. Gunadi (2019) dalam (Marcella & Anas, 2023) menyatakan bahwa semakin lama wisatawan tinggal dan semakin besar pengeluaran mereka, maka hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

Di sisi lain, salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemampuan individu. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan karena pendidikan yang baik dapat meningkatkan peluang individu untuk hidup lebih sukses. Pendidikan memberikan

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja sehingga mampu meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, seseorang lebih kompetitif di pasar kerja dan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi pribadi, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kesejahteraan individu akan meningkat, yang juga akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Stepanie Ayu Pradipta, 2020). Peningkatan pendidikan menunjukkan bahwa individu memiliki potensi lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pendidikan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu kesehatan, lingkungan, dan hak-hak sosial, yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi hidup perorangan, tetapi juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga menjadi strategi penting dalam mengatasi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau wilayah, yang tercermin dalam peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara stabil mendorong penciptaan lapangan kerja melalui ekspansi sektor industri, jasa, dan pariwisata, yang pada akhirnya dapat

menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut mencerminkan bahwa kondisi perekonomian di wilayah tersebut sedang berada dalam keadaan yang baik dan berkembang (Kurniawan et al., 2015).

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan kompleks dengan kondisi kemiskinan, di mana pertumbuhan yang berlangsung secara berkelanjutan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan akses terhadap layanan dasar. Saat perekonomian suatu negara atau daerah mengalami kemajuan, biasanya akan diikuti oleh peningkatan dalam investasi dan konsumsi, yang kemudian membuka kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat di kelompok ekonomi bawah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan tambahan (dalam kondisi *ceteris paribus*), yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi di mana pertumbuhan ekonomi justru diiringi oleh meningkatnya angka kemiskinan (Kurniawan et al., 2015). Manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. pertumbuhan ekonomi yang melambat atau mengalami penurunan, biasanya terjadi pengurangan investasi dan konsumsi, yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat. Apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka ketimpangan antara

masyarakat kaya dan miskin dapat semakin melebar, yang pada akhirnya memperparah tingkat kemiskinan.

Pengangguran merupakan suatu keadaan ketika individu dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi tetap berusaha mencari kesempatan kerja. Situasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, atau kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Pengangguran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dengan permintaan pasar, atau karena kondisi perekonomian yang mengalami ketidakstabilan (Adely et al., 2021 dalam Adianita et al., 2024).

Pengangguran dapat memberikan dampak besar terhadap tingkat kemiskinan dan membentuk siklus yang sulit dihentikan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia kehilangan sumber penghasilan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kondisi ini bisa membuat individu masuk dalam kategori miskin atau memperparah keadaan miskin yang sudah dialami. Selain itu, jika pengangguran berlangsung dalam waktu lama, hal ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental dan fisik seseorang, yang pada akhirnya mengurangi kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Salah satu faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan (Mahsunah, 2013).

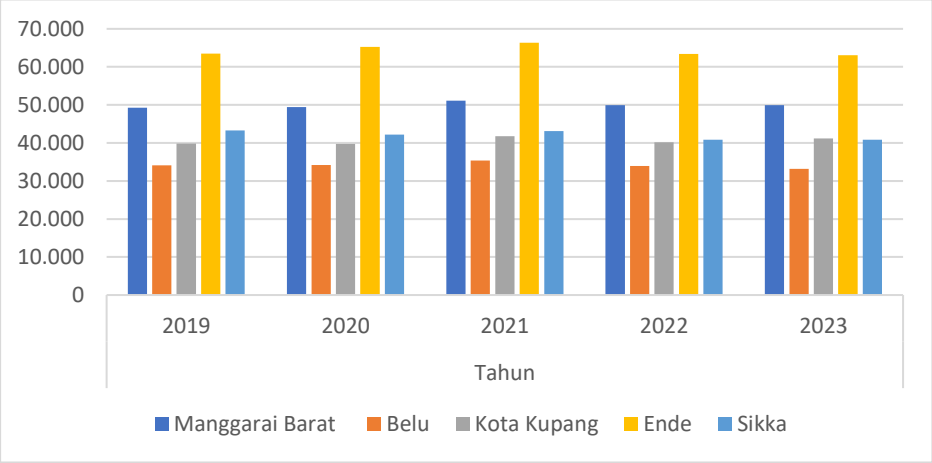

Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dalam periode lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2021, Kabupaten Ende menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi mencapai 66,38 ribu jiwa dibandingkan kabupaten lainnya. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk miskin yang rendah adalah Kabupaten Belu dengan jumlah 35,41 ribu jiwa. Peningkatan pada tahun 2021 tersebut disebabkan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Adanya perbedaan pada jumlah penduduk miskin yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan pada Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende

dan Kabupaten Sikka. Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat rumit dan berlangsung dalam jangka waktu lama (Prawoto, 2009).

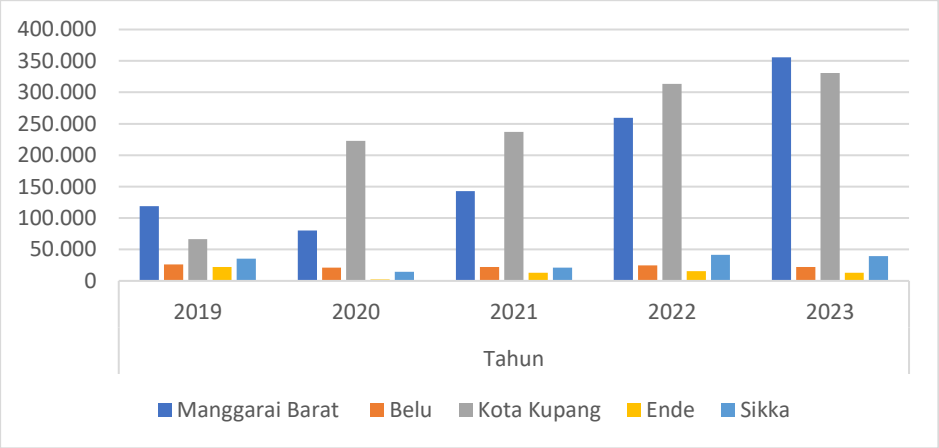

Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.2

Jumlah tamu hotel (Jiwa) Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Gambar 1.2 Jumlah tamu hotel di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun pada saat tahun 2020, kunjungan tamu hotel terjadi penurunan yang disebabkan oleh wabah Covid-19, sehingga adanya Penetapan kebijakan Pembatasan Kegiatan (PPKM) yang menyebabkan banyak sektor yang membatasi aktivitasnya atau penutupan sementara. Pada tahun 2020 Kabupaten Ende menjadi daerah dengan kunjungan tamu hotel terendah yaitu sebanyak 2.117 jiwa. Sedangkan jumlah tamu yang tertinggi adalah Kota Kupang, yaitu sebanyak 222.909 jiwa. Setelah melewati beberapa tahun setelah Covid-19

perekonomian sudah mulai membaik sehingga aktivitas kembali normal. Sehingga jumlah tamu hotel dari kelima kabupaten tersebut kembali meningkat. Pada tahun 2023 Kabupaten Manggarai Barat menjadi daerah dengan jumlah tamu hotel tertinggi, dengan angka mencapai 355.836 jiwa.

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan masih tetap ada, khususnya dalam memastikan industri pariwisata beroperasi secara berkelanjutan. Peningkatan jumlah tamu hotel pada tahun 2023 cukup menjanjikan, namun juga memerlukan perhatian. Hal ini menunjukkan ketahanan industri pariwisata, oleh karena itu pentingnya strategi pemulihan yang efektif untuk kembali menarik wisatawan. Sektor pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan wilayah lokal yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan (Gunadi, 2019).

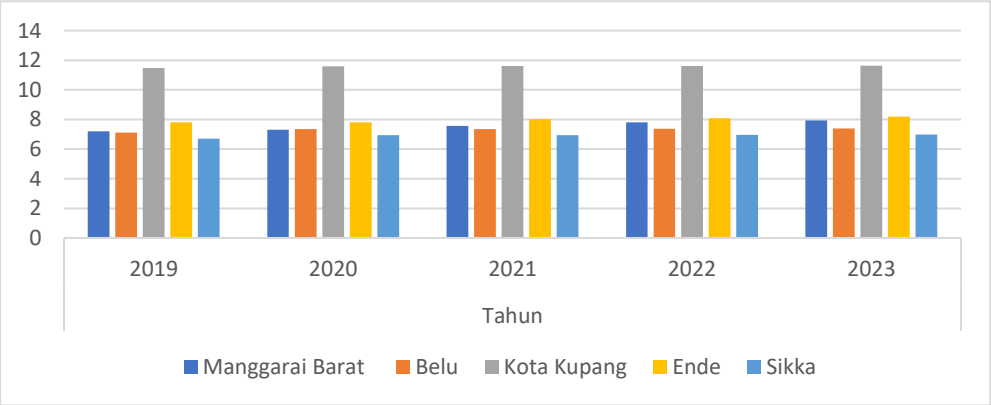

Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.3

Rata-rata Lamanya Sekolah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 Data menunjukkan peningkatan yang baik tiap

tahunnya dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka. Dari data tersebut, Kabupaten Sikka memiliki rata-rata lama sekolah terendah, yaitu 6,71 tahun pada 2019 dan sedikit mengalam peningkatan menjadi 6,98 tahun pada 2023. Sebaliknya, Kota Kupang mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi, yakni 11,47 tahun pada 2019 dan mengalami peningkatan menjadi 11,62 tahun pada 2023.

Peningkatan rata-rata lama sekolah mencerminkan adanya kemajuan yang cukup baik dalam sektor pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah bersama masyarakat untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan telah memberikan hasil positif. Berbagai program seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, serta penyediaan tenaga pendidik yang lebih merata turut mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya merata karena masih terdapat perbedaan antarwilayah. Ketimpangan ini terlihat dari keterbatasan akses maupun mutu pendidikan di beberapa kabupaten yang belum seimbang dengan daerah lain. Faktor utama yang memengaruhi antara lain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi guru yang belum merata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai serta meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan indikator penting dalam menilai keberhasilan

pembangunan suatu daerah. Menurut Jundi & Poerwono (2014) peningkatan pendidikan diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas individu.

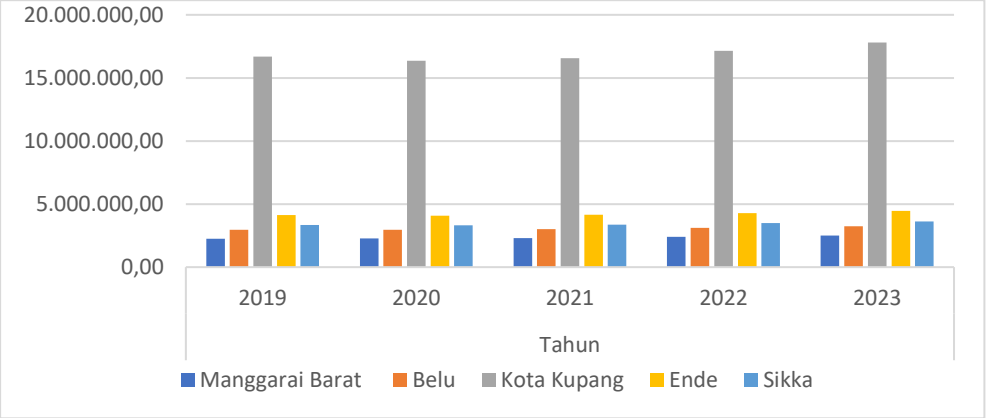

Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.4

PDRB Tahunan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten SikkaTahun 2019-2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4 Pada Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka adanya fluktuasi pada PRDB tahunan atas dasar harga konstan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 setiap kabupaten mengalami penurunan yang disebabkan wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan aktivitas, yang menyebabkan banyak sektor yang ditutup, sehingga perekonomian menjadi buruk. Pada data tersebut Kabupaten dengan PRDB yang paling rendah adalah Manggarai Barat, dengan angka 2267582,96 (juta rupiah). Sementara itu Kota Kupang menjadi daerah dengan ekonomi mencapai 16350996,2 (juta rupiah) dibandingkan kabupaten lainnya. Paska Covid-19

perekonomian kembali pulih, sehingga terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerahnya. Pada tahun 2023 Kota Kupang masih menjadi tertinggi, mencapai 17810932,10 (juta rupiah). Perbedaan tersebut menggambarkan adanya variasi dalam dinamika perekonomian antar kabupaten. Salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap fenomena kemiskinan adalah laju pertumbuhan ekonomi (Atalay, 2015).

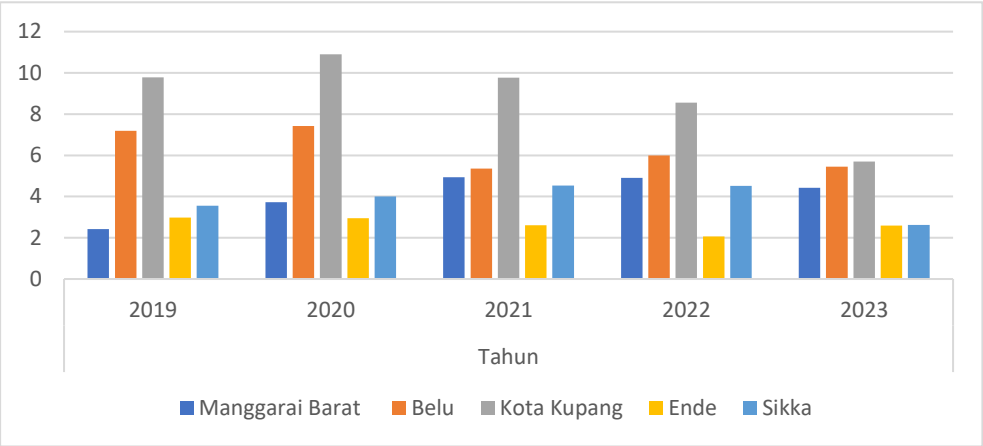

Sumber: (Badan Pusat Statistik)

Gambar 1.5

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2020.

Berdasarkan Gambar 1.5 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Umumnya pada tahun 2020 menjadi tahun dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Faktor utama penyebab permasalahan ini adalah Covid-19, hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas dari berbagai sektor

dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang bahkan kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2020, Kabupaten dengan tingkat pengangguran paling tinggi adalah Kota Kupang yang mencapai 10,90% . Sedangkan tingkat pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Ende, dengan angka 2,95%.

Setelah melewati pemulihan pada perekonomian, tingkat pengangguran setiap daerah mulai berkurang. Perbedaan ini mencerminkan adanya tantangan yang berbeda-beda dalam mengatasi pengangguran di setiap kabupaten. Setiap daerah memiliki kondisi dan faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran secara spesifik, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang sesuai. Menurut Giovanni (2018), tingginya tingkat pengangguran di suatu daerah dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh sektor pariwisata terhadap kemiskianan yang dilakukan oleh Oludele Oluwatosin Adeniyi (2019); Marcella & Anas (2023) menunjukan bahwa sektor pariwisata berpengaruh dan memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Sedangkan penelitian Nur & Indrawati (2022) menunjukan bahwa sektor pariwisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Kemudian pada penelitian terdahulu terkait pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Susanto & Indah, (2019) menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka

kemiskinan. Sedangkan penelitian Meylana Widya Mindayanti, Wiwin Primadhana, dan Mohammad Wahed (2021) menunjukan bahwa prndidikan tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Pada Penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Meylana Widya Mindayanti, Wiwin Primadhana, dan Mohammad Wahed (2021); Safuridar (2017) menunjukan bahwa Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sedangkan pada penelitian Nainggolan (2020) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Selanjutnya pada penelitian terkait pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh Stepanie Ayu Pradipta (2020) menunjukan bahwa pengangguran berkontribusi dan menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan angka kemiskinan. Sedangkan pada penelitian Siregar & Batubara (2022) menunjukan bahwa pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan angka pengangguran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, terdapat perbedaan hasil penelitian, sehingga hal dapat dijadikan ***gap*** **penelitian**. Oleh karena itu penelian ini sangat penting dilakukan karena untuk memastikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang nantinya akan menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga nantinya kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga

menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan sosial dan peng entasan kemiskinan secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wisatawan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atau manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Selain itu, adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian baru terkait pengaruh jumlah wisatawan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka yang dapat menambah wawasan dalam literatur terkait kajian tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Perumusan kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
2. Strategi pembangunan: memberikan rekomendasi untuk pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini penting untuk

menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, yang pada akhirnya dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat: Temuan ini membantu dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan pendidikan, keterampilan di sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran. Proyek ini dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
4. Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, potensi pariwisata daerah, pertumbuhan ekonomi dan penekanan pada angka pengangguran. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam memajukan kedua bidang tersebut dan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup analisis dampak jumlah wisatawan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2023. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kontribusi masing-masing sektor terhadap perubahan angka kemiskinan dengan berfokus pada data statistik serta indikator ekonomi yang relevan selama kurun waktu tersebut. Dalam penelitian beberapa batasan masalah yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Fokus geografis: Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sikka. Sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa digeneralisasikan untuk wilayah lain.
2. Variabel yang diteliti: Penelitian ini berfokus pada analisis lima variabel utama, yaitu sektor pariwisata, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Variabel lain yang berpotensi memengaruhi, seperti kesehatan dan kebijakan sosial, tidak termasuk dalam pembahasan.
3. Periode waktu: Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2013 hingga 2023, sedangkan data di luar rentang waktu tersebut tidak akan dianalisis.
4. Metode analisis: Penelitian ini menerapkan metode analisis kuantitatif deskriptif, sehingga aspek kualitatif yang berpotensi memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kemiskinan tidak akan dibahas.